



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

Rapat ke	:	11 (sebelas)
Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN RI.
Hari, Tanggal	:	Senin, 30 Agustus 2021
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Acara	:	<b>Kementerian Koperasi dan UKM :</b> 1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020; 2. <i>Progress</i> Realisasi Anggaran TA 2021; 3. Pembahasan RKA KL TA 2022 dan 4. <i>Progress</i> dan evaluasi pelaksanaan BPUM.  <b>Kementerian BUMN :</b> 1. Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020; 2. <i>Progress</i> Realisasi Anggaran TA. 2021; 3. Pembahasan RKA KL TA 2022; dan 4. PMN TA 2022 dan tambahan PMN TA 2021.
Hadir	:	1. 50 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. a. Menteri Koperasi dan UKM; b. Menteri BUMN RI; c. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN RI pada pukul 14.31 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN RI pada hari Senin, 30 Agustus 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

## II. KESIMPULAN RAPAT

### I. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM selama 7 (*tujuh*) tahun berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran reguler tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2021 per 30 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp349.361.908.363,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp756.513.460.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) atau sebesar 46.18%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp1.441.784.886.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp370.430.390.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
  - b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.071.354.496.000 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan perubahan pagu per program anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022 sesuai Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM No.B-489/KUKM/SM/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 kepada Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/BAPPENAS sebesar Rp1.441.784.886.000 (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp387.796.902.000 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
  - b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1.053.987.984.000 (*Satu Triliun Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Koperasi UKM RI terkait realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 sebesar Rp14.211.962.400.000 (*Empat Belas Triliun Dua Ratus Sebelas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) yang diberikan kepada 11.843.302 (*Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua*) pelaku usaha mikro.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM terkait seluruh program Kementerian Koperasi dan UKM agar melakukan evaluasi mengenai data, administrasi, dan kemanfaatan bagi pelaku usaha terutama Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang selanjutnya akan didalami pada Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi UKM RI di Komisi VI DPR RI.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi UKM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

## II. KEMENTERIAN BUMN RI

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Kementerian BUMN atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian BUMN selama 14 (*empat belas*) tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk meningkatkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 mengingat penyerapan realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2021 per 27 Agustus 2021 baru mencapai sebesar Rp117.317.532.071 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dari alokasi anggaran sebesar Rp193.047.600.000 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) atau sebesar 60.77%.
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian BUMN tahun 2022 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. S-634/MK.02/2021 dan No. 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 sebesar Rp208.245.675.000 (*Dua Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
  - a. Belanja pegawai sebesar Rp75.117.609.000 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).
  - b. Belanja barang sebesar Rp131.983.066.000 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
  - c. Belanja Modal sebesar Rp 1.085.000.000 (*Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN RI terkait BUMN penerima tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan KMK No. 298 tahun 2021 sebesar Rp16.900.000.000.000,- (*Enam Belas Triliun Sembilan Ratus Miliar Rupiah*) dan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Perum Perumnas yang akan digunakan dalam upaya memperbaiki struktur permodalan untuk melanjutkan program pengadaan "Satu Juta Rumah" bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp1.570.000.000.000 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah*).
  - b. PT PLN (Persero) yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa sebesar Rp5.000.000.000.000 (*Lima Triliun Rupiah*).
  - c. PT Utama Karya (Persero) yang akan digunakan dalam penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera dengan target tambahan panjang 162 KM sebesar Rp23.850.000.000.000 (*Dua Puluh Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).
  - d. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian ruas tol Kayu Agung–Palembang–Betung dan ruas tol Bogor–Ciawi–Sukabumi sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).
  - e. PT Adhi Karya(Persero) Tbk. yang akan digunakan dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Solo-Yogya–Kulonprogo dan Yogyakarta Bawen serta SPAM Regional Karian-Serpong sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.56 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**



**Aria Bima**  
A-189